

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 372 HURUF F
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN
DPRD TERKAIT HAK IMUNITAS
ANGGOTA DPRD**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

ALAN YOGA PRATAMA
NPM : 2174201001588

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 372 HURUF F
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN
DPRD TERKAIT HAK IMUNITAS
ANGGOTA DPRD**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

ALAN YOGA PRATAMA

NPM : 2174201001588

**UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
FAKULTAS HUKUM**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal : 28 Januari 2026



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 372 HURUF F
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN
DPRD TERKAIT HAK IMUNITAS
ANGGOTA DPRD**

Dipersiapkan dan disusun oleh

ALAN YOGA PRATAMA
NPM :2174201001588

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : 28 Januari 2026

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji

Dr. Muhammad Mashuri, SH, MH.

Sekretaris Penguji

Dr. Rommy Winarno, SH, M.Hum.

Anggota Dewan Penguji

Dwi Budiarti, SH, M.Hum.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal 28 Januari 2026

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan



Yudhia Ismail SH, M.Hum

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ambiguitas dan potensi penyalahgunaan penafsiran terhadap hak imunitas anggota DPRD Kota. Meskipun dijamin oleh Undang-Undang, dalam praktiknya sering terjadi benturan antara perlindungan profesi legislator dengan prinsip kesetaraan dihadapan hukum, terutama terkait batasan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan tugas kedewanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriteria hukum dalam penggunaan hak imunitas anggota DPRD Kota serta menjelaskan tujuan hukum yang hendak dicapai melalui perlindungan tersebut berdasarkan Pasal 372 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3).

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak imunitas anggota DPRD bukanlah hak kebal hukum yang bersifat personal, melainkan hak fungsional yang dibatasi oleh kriteria materiil (terkait tugas dan wewenang), kriteria ruang (baik di dalam maupun di luar rapat resmi), dan kriteria perlindungan fisik (*inviolability*) yang memerlukan izin tertulis dari Gubernur untuk pemeriksaan hukum.

Tujuan hukum penggunaan hak imunitas ini adalah untuk mewujudkan keadilan politik, menjamin independensi lembaga legislatif, serta melindungi kedaulatan rakyat agar fungsi pengawasan terhadap eksekutif dapat berjalan tanpa hambatan berupa kriminalisasi politik. Meskipun demikian, hak ini tetap memiliki batasan dan tidak berlaku pada tindak pidana khusus, pelanggaran rahasia negara, atau pelanggaran kode etik.

Kata Kunci : Hak Imunitas, DPRD Kota, UU MD3

**PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI**

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi.
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis/dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggungjawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 28 Januari 2026

Mahasiswa,



Alan Yoga Pratama

NPM : 2174201001588

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Pasal 372 Huruf F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Terkait Hak Imunitas Anggota DPRD” mampu diselesaikan penulis. Tak lupa sholawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan yang benar.

Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata-1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Selama penulis mengikuti perkuliahan telah banyak menimba ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para dosen di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang didapat menambah wawasan kepada penulis sebagai bekal untuk menyelesaikan skripsi.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghormatan, ucapan terima kasih, serta apresiasi yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Dr. Muhammad Misdrum, S.Kom., MM., M.Kom.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, SH., M.Hum.
3. Bapak Dr. Ronny Winarno, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta petunjuk-petunjuk yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini;

4. Ibu Dwi Budiarti, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, serta petunjuk-petunjuk yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Mashuri, SH., MH selaku Ketua Penguji, yang telah memberikan pengarahan, serta petunjuk-petunjuk yang diperlukan dalam proses penyusunan skripsi ini;
6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan;
7. Kedua orang tua dan saudara kandung yang senantiasa mendoakan dan memberi semangat kepada penulis;
8. Teman-teman yang telah memberi masukan dan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.

Penulis sepenuhnya memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan masih terbatasnya waktu serta ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang diberikan guna penyempurnaan hasil akhir dari skripsi. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas dengan sebaik-baiknya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses pembuatan skripsi ini.

Pasuruan, 28 Januari 2026

Mahasiswa



Alan Yoga Pratama

NPM. 2174201001588

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi / Bimbingan



DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang DPRD Kota	11
1. Pengertian tentang DPRD Kota	11
2. Tugas pokok, fungsi, dan kedudukan DPRD Kota	14
3. Asas-asas, wewenang, dan pengaturan hukum DPRD Kota	19
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Imunitas	24
1. Pengertian tentang hak imunitas	24
2. Asas-asas, jenis, dan pengaturan hukum hak imunitas	26
3. Manfaat dan karakteristik hak imunitas bagi DPRD	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Hak Imunitas Dalam Sistem Hukum Indonesia	42
1. Pengertian mengenai pengaturan hak imunitas dalam sistem hukum Indonesia	42
2. Kekuatan hukum hak imunitas dalam sistem hukum Indonesia ..	44
3. Mekanisme dan konsekuensi hukum dalam penggunaan hak imunitas dalam sistem hukum Indonesia	45
BAB III : METODE PENELITIAN	49
A. Perspektif Pendekatan Penelitian	49
B. Ruang Lingkup Penelitian	50
C. Jenis dan Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	54

E. Teknik Analisis Bahan Hukum	54
BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 372 HURUF F UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD TERKAIT HAK IMUNITAS ANGGOTA DPRD.....	55
A. Kriteria Hukum dalam Penggunaan Hak Imunitas Anggota DPRD Berdasarkan Pasal 372 Huruf f UU No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD	55
B. Tujuan Hukum yang Hendak Dicapai Terkait Penggunaan Hak Imunitas Anggota DPRD	68
BAB V : PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	

